

Pidato Kebangsaan

NEGARA PANCASILA:BAITUNA JANNATUNA

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Disampaikan pada : Peringatan Hari Lahir Pancasila
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

1 Juni 2012

NEGARA PANCASILA: BAITUNA JANNATUNA

M. Din Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah

*Aku lahir di sini, kau lahir di sini
kita hadir bersama di negeri ini
di negeri ini aku dan kau
bersatu menjadi kita
satu keluarga yang menikmati
indahya rumah kita, surga kita.*

Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 juni, menuntut kita untuk melakukan orientasi “*back to the future*” atau “kembali ke masa depan”. Hal ini kita lakukan dengan retrospeksi ke masa lalu dan proyeksi ke masa mendatang, yakni menghayati perjalanan bangsa dan proses pembentukan Negara Pancasila, serta mencermati tantangan bangsa dan negara dewasa ini dengan mengisi “*a planned future*” atau “masa depan terencana” secara bertanggung jawab.

Baituna jannatuna yang berarti rumah kita surga kita (diambil dari ungkapan Nabi Muhammad SAW “*baity jannaty*” atau rumahku surgaku) adalah pesan analog bagi bangsa Indonesia agar menjadikan Negara Pancasila sebagai rumah surgawi. Rumah surgawi adalah wadah bersama setiap dan segenap warga negara, yang bersama-sama menikmati keindahan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, sebagaimana mereka berada di surga ukhrawi nanti. Negara Pancasila, dalam hal ini, bukan sekedar pilar, tetapi telah menjadi bangunan kokoh yang menaungi 240 juta penduduk Indonesia, dan jutaan lagi anak bangsa yang akan hidup pada masa akan tiba.

Pancasila adalah *common platform* dan *common denominator* bagi bangsa Indonesia. Meminjam istilah al- Qur’an, Pancasila dapat juga dipandang sebagai *kalimatun sawa’* atau “kata tunggal pemersatu” bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini, Pancasila lebih dari sekedar “pernyataan politik” (*political statement*), tapi juga “pernyataan ideologis” (*ideological statement*). Sebagai “pernyataan politik” Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada. Berbagai aliran politik di kalangan bangsa, baik atas dasar keagamaan, maupun kebangsaan,

seyogyanya tidak dipertentangkan dan mempertentangkan diri dengan Pancasila, tapi aliran-aliran politik itu hanyalah titik tolak dan warna perjuangan kelompok-kelompok politik yang diselenggarakan dalam kerangka Pancasila dan visi Negara Pancasila.

Sebagai “pernyataan ideologis” Pancasila adalah *rendevous* nilai-nilai yang terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Masing-masing kelompok agama memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dari yang lain, khususnya pada dimensi teologis, tetapi agama-agama bisa bertemu pada dimensi etik, yaitu dengan mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal. Pluralisme keagamaan tidak berarti harus menyamakan agama-agama. Dalam hal ini, perbedaan tidak perlu disama-samakan, namun persamaan tidak harus dibeda-bedakan. Pancasila merupakan wadah akomodasi nilai-nilai etika yang mengakar kuat dalam berbagai agama dan budaya untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara.

Adalah Bung Karno yang paling berjasa dalam menggali nilai-nilai Pancasila melalui pidato bersejarahnya pada 1 Juni 1945. Pada mulanya para pendiri bangsa yang diwakili oleh sembilan tokoh dari berbagai golongan telah menyepakati Piagam Jakarta pada

Mei 1945. Namun, ada keberatan dari sejumlah tokoh Kristiani dari kawasan Timur Indonesia yang menganggap sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” bersifat eksklusif. Adalah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Hoof Bestuur Muhammadiyah waktu itu, yang berjasa menggantikan rumusan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Pancasila sekarang ini. Maka tidaklah salah jika dikatakan, Pancasila adalah buah kearifan dan kebijaksanaan para tokoh Islam yang menginginkan ketuhanan bangsa dan negara.

Dengan penerimaan Pancasila sebagai falsafah dan dasar bagi negara baru merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah ini menjadi wilayah perjanjian, dan NKRI adalah Negara Perjanjian (*Abode of Concensus* atau *Darul Ahdi*). Kesepakatan untuk menerima Negara Pancasila tentu mengikat setiap dan segenap warga Negara, dari generasi ke generasi dalam gerak melintas zaman.

Bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dijadikan sebagai sikap keagamaan yaitu menepati dan memelihara janji dan amanat. Sikap ini perlu mengejawantah dalam sikap batin yang berdimensi ganda, yaitu menjadi Muslim dan

orang Indonesia sekaligus. Dimensi ganda ini sejalan dengan misi kekhalifahan manusia sebagai “wakil Tuhan di bumi” (*khalifatullah fil ardh*) yang dijemakan pertama sekali sebagai *khalifatullah fi Indonesia* atau “wakil Tuhan di Indonesia”.

Sebagai Negara Perjanjian atau *Darul Ahdi*, Negara Pancasila adalah bentuk final dan ideal bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan dukungan motto “Bhineka Tunggal Ika”, bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemajemukannya dalam keutuhan. Dalam kaitan ini, Negara Pancasila perlu dijadikan sebagai rumah besar bangsa, tempat seluruh elemen dan komponen bangsa hidup bersama dalam suasana penuh ketenangan, kerukunan, dan kebersamaan. Segenap penghuni rumah bersedia hidup berdampingan secara damai. Mereka bersama membina “hidup berumah tangga” dalam gairah meraih *sakinah, mawaddah wa rahmah* kebangsaan. Mereka bersama menjadikan rumah besar itu “rumah kita surga kita”. Maka dalam Negara Pancasila tidak boleh ada pihak yang memantik percikan api (neraka) keserakahan, kezaliman, dan kekerasan, seperti dalam wajah monopoli, eksklusifisme, mau menang sendiri, dan diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Tidak boleh ada pula orang-orang yang menebar virus-virus kemungkaran dan kemaksiatan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan sikap-sikap manipulatif, eksploitatif, dan destruktif.

Secara teoritis Pancasila dapat membawa bangsa ke kemajuan dan keunggulan. Namun, permasalahan Indonesia selama ini terletak pada ketidakmampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa secara nyata, dan kegagalan Negara dalam menyenyawakan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem dan budaya bernegara (*state culture*). Masih terdapat paradoks pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti kecenderungan akomodasi dan aplikasi nilai-nilai dalam praksis sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai akibatnya, cita-cita Trisakti Bung karno “berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya” nyaris jauh panggang dari api.

Begitu pula, terdapat gejala anomali dalam aktualisasi Pancasila oleh negara dan pelaku non-negara, dan sering terjadi konfrontasi Pancasila dengan agama, baik oleh Negara maupun oleh umat beragama itu sendiri. Hal-hal demikian merupakan kontra-produktifitas dalam penegakan Negara Perjanjian, dan dapat mengendurkan derajat penghayatan rakyat warga negara terhadap janji mereka.

Adalah suatu ironi jika bangsa Indonesia mengabaikan Pancasila, sementara di luar negeri banyak tokoh memuji Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai sebuah

model dan alternatif bagi dunia yang multikultural. Dapat disebutkan, dalam hal ini, dua contoh yaitu: Pertama, wakil Paus Benediktus XVI di Spanyol dalam sambutan resminya pada pembukaan konperensi Community of Sant' Egidio di Barcelona 2010 menyebut tentang kedua pilar bangsa Indonesia itu sebagai ideologi relevan untuk masyarakat global dewasa ini, dan kedua, seorang tokoh Katholik Jerman dalam The Second Catholic – Muslim Forum di Laut Mati, Jordania, mengemukakan hal serupa.

Maka adalah saatnya bagi kita untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai etos dan etika bangsa. Adalah saatnya bagi bangsa untuk menjadi Negara Pancasila, selain sebagai Negara Perjanjian (*Darul Ahdi*), juga sebagai Negara Kesaksian (*Darus Syahadah*). Sebagai Negara Kesaksian atau Darus Syahadah, setiap kelompok harus siap *berfastabiqul khairat*, yaitu berlomba-lomba dalam meraih kemajuan dan keunggulan. Perlombaan berlangsung atas etika sportifitas, siap menerima kemenangan dan kekalahan. Perlombaan juga harus berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, bukan menang dengan menghalalkan secara cara.

Dalam konteks globalisasi yang meniscayakan kualitas, persaingan, dan daya saing, menjadikan Negara Pancasila sebagai Negara Kesaksian mengandung pesan agar bangsa Indonesia siap bersaing dan bertanding dalam berbagai aspek peradaban. Daya juang yang menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) bangsa perlu ditransformasi menjadi daya saing. Saatnya bangsa untuk mulai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab globalisasi membawa adagium “*no longer number counts, but quality counts*”, tidak lagi angka yang berbilang, tetapi kualitaslah yang diperhitungkan.

Menghadapi persaingan peradaban tinggi dengan bangsa-bangsa lain dewasa ini diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi mentalitas bangsa ke arah pembentuk manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental seperti kejujuran, ketulusan, keberanian, kemandirian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan, dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni setiap tahun jangan berhenti pada seremoni, tetapi harus berlanjut pada aksi; jangan bermuara pada kata-kata, tetapi harus berlabuh pada tindakan nyata. Tema peringatan tahun ini “Djiwa kita Djiwa Indonesia, Djiwa kita bernafas Pancasila” akanhanya menjadi rangkaian kata-kata indah, jika kita tidak mampu mengubah dan menggubahnya menjadi deretan prestasi bangsa.

www.mpr.go.id